

5. PENUTUP

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), secara keseluruhan PMA dan PMDN Pariwisata di enam provinsi di pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2009-2016. Peningkatan PMA pariwisata dan PMDN pariwisata paling tinggi terjadi pada periode 2015-2016. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menarik minat investor baik dalam negeri maupun investor asing untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di pulau Jawa.

Berdasarkan hasil regresi, variabel infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan sehingga dapat diartikan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur berpengaruh positif terhadap minat investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di pulau Jawa. Hasil ini sesuai dengan perkiraan awal penulis bahwa semakin tinggi ketersediaan dan kualitas infrastruktur akan mempermudah mobilisasi, akses terhadap pasar dan dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga dapat lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya pada sektor pariwisata di pulau Jawa.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif terhadap minat investor untuk menanamkan modal. Hal ini tidak sesuai dengan perkiraan awal penulis, dimana variabel pertumbuhan PDRB seharusnya memiliki hubungan positif dengan minat investasi investor. Fenomena ini terjadi ketika investor lebih tertarik pada objek wisata potensial yang bisa dikembangkan untuk kedepannya.

Hasil regresi berikutnya menunjukkan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif terhadap minat investor. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkiraan awal penulis, bahwa tinggi rendahnya UMP yang dibayarkan akan menjadi pertimbangan bagi investor ketika akan menanamkan modalnya. Semakin tinggi upah yang dibayarkan maka akan semakin menyurutkan minat investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di pulau Jawa. Diperkirakan, investor cenderung sudah mempertimbangkan tingkat produktivitas pekerja, karena pada umumnya upah yang tinggi diiringi dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

Variabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada persamaan pertama juga memiliki hubungan positif terhadap minat investor dalam berinvestasi pada

sektor pariwisata di pulau Jawa. Hasil ini sesuai dengan perkiraan awal penulis bahwa wisatawan mancanegara yang berasal dari negara yang sama dengan investor akan menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Selain itu, wisman akan lebih mengenali produk yang berasal dari negara mereka. Disisi lain, keberadaan wisatawan mancanegara yang berasal dari negara maju pada umumnya memiliki daya beli yang tinggi sehingga keberadaannya dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi.

Pada persamaan kedua, variabel jumlah kunjungan wisatawan (nusantara & mancanegara) memiliki hubungan positif dengan minat investor domestik untuk menanamkan modal pada sektor pariwisata di pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan perkiraan penulis bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi dapat mendatangkan keuntungan bagi investor domestik. Selain itu, investor domestik dapat menggunakan kesempatan ini sebagai sarana promosi destinasi wisata kepada para wisatawan terutama wisatawan mancanegara karena bisnis investor domestik pada umumnya merefleksikan budaya setempat yang ada.

Dari hasil diatas, pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan cara menarik investor untuk menanamkan modalnya pada sektor tersebut, mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor potensial untuk mendatangkan devisa. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang nantinya akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah, selain itu juga penetapan Upah Minimum Provinsi yang harus diiringi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja. Disisi lain, pemeliharaan dan promosi destinasi wisata juga diperlukan agar dapat menarik kedatangan wisatawan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya dapat menarik minat investor untuk berinvestasi sekaligus mengembangkan destinasi wisata yang ada dan menambah pemasukan daerah melalui sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2017). *Perkembangan Investasi Berdasarkan Lokasi Per Sektor*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Basri, F. (2002). *Perkonomoian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- BKPM. (2017). *Badan Koordinasi Penanaman Modal*. Diakses melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal: <http://www.bkpm.go.id/> pada tanggal 1 Maret 2018.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2010). *Tourism*. Cheltenham, United Kingdom: Channel View Publications.
- Habibi, F. (2013). Foreign Direct Investment, Tourism and Economic Growth in Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, 48(3), 381-390.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Jahanbakhshian, P. (2014). Review of the Impact of Foreign Direct Investment on Tourism Industry. *Advanced Social Humanities and Management*, 1(4), 10-15.
- Jhingan, M. L. (2008). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karyono, H. A. (1997). *Kepariwisata*. Jakarta: Gasindo.
- Kemenpar. (2012). *Rencana Strategis 2012-2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kemenpar. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (1999). *International Economics: Theory and Policy 5th Edition*. Boston: Addison-Wesley.
- Kurniati, Y., Prasmuko, A., & Yanfitri. (2007). *Determinan FDI (Faktor-faktor yang Menentukan Investasi Asing Langsung)*. Working Paper Bank Indonesia.
- Mankiw, G. N. (2007). *Macroeconomics, 6th Edition*. New York: Worth Publisher.
- Markusen, J. (1995). *International Trade Theory and Evidence*. New York: MC Graw Hills, Inc.
- Marpaung, H. (2002). *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Marsuki, & Suryana, A. S. (2007). *Iklim Investasi Daerah*. Jakarta: KAS>Z.

- Panasiuk, A. (2007). Tourism Infrastructure As A Determinants Of Regional Development. *Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos*, 1(8), 212-215.
- Peric, J., & Radic, M. N. (2011). Sustainable Foreign Direct Investment In Tourism Sector Of Developing Countries. *Sustainable Tourism: Sosio-Cultural, Enviromental and Economics Impact*, 1(1), 263-278.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Samimi, A. J., Sadeghi, S., & Sadeghi, S. (2013, July). The Relationship Between Foreign Direct Investment and Tourism Development: Evidence From Developing Countries. *Institutions and Economies*, 5(2), 59-68.
- Santi, F., Oktarina, R. H., & Kustiara, R. (2014, Juni). Analysis Determinants of Investment, Demand, and Supply Indonesian Tourism. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 4(3), 16-27.
- Snyman, J. A., & Saayman, M. (2009). Key Factor Influencing Foreign Direct Investment In The Tourism Industry In South Africa. *Tourism review*, 64(3), 49-58.
- Sodik, J., & Nuryadin, D. (2008). Determinan Investasi Di Daerah: Studi Kasus Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 15-31.
- Soekadji, R. G. (2000). *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai Systematic Linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suneki, S. (2006). *Determinan Perilaku Investasi Swasta Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis.
- United Nations. (2007). *FDI in Tourism: The Development Dimension*. New York: United Nations.
- Yoeti, O. (1995). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Angkasa.

Daftar Pustaka Data

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2010). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2011). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2012). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2013). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2014). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2015). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2016). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2017). *Banten Dalam Angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2010). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2011). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2012). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2013). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2014). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2015). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2016). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2017). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2010). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2011). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2012). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2013). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2014). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2015). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2016). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2017). *DKI Jakarta Dalam Angka*. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2010). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2011). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2012). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2013). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2014). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2015). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2016). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2017). *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2010). *Jawa Tengah Dalam Angka*.
Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2011). *Jawa Tengah Dalam Angka*.
Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2012). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2013). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2014). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2015). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2016). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2017). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2010). *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2011). *Jawa Tiimur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2012). *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2013). *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2014). *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2015). *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2016). *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2017). *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- Kementerian Perhubungan. (2013). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2013, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. Jawa Tengah*. Semarang: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2010). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2010, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2011). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2011, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2011). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2011, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- Kementerian Perhubungan. (2011). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2011, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2011). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2011, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2011). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2011, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2011). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2011, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2011). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2011, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2012). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2012, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Jenderal Perhubungan darat.
- Kementerian Perhubungan. (2012). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2012, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2012). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2012, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2012). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2012, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2012). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2012, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2012). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2012, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- Kementerian Perhubungan. (2013). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2013, Prov Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2013). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2013, Prov. DI Yogyakarta*. Yogyakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2013). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2013, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2013). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2013, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2013). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2013, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2013). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2013, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: Direktorat Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2014, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2014, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2014, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2014, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2014, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- Kementerian Perhubungan. (2014). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2014, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2015, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2015, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2015, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2015, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2015, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2015, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2016). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2016, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2016). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2016, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2016). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2016, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- Kementerian Perhubungan. (2016). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2016, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2016). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2016, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2016). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2016, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2017, Prov. Banten*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2017, Prov. DI Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2017, Prov. DKI Jakarta*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2017, Prov. Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2017, Prov. Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Profil dan Kinerja Transportasi Darat Tahun 2017, Prov. Jawa Timur*. Jakarta: kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal